



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADIMAN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 956483

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.170.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.749 m2/144 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 757 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 460.200.000
5. Tanah Seluas 4.910 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 1.750.000.000
6. Tanah Seluas 1.055 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 800.000.000
8. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 140.000.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **204.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 88.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 237.319.052

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.699.519.052

III. HUTANG Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.689.519.052

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.